

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Peranan

Peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.¹

Ditinjau dari perilaku organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Di sini secara umum ‘peran’ dapat didefinisikan sebagai “*expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*”. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu *Role perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut; dan *Role expectation*: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi harus

¹ Mutiawanthi. Tantangan “*Role*” Peran Yang Dihadapi Oleh Mantan Perawat Ij-Epa Setelah Kembali Ke Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Volume. 4, No. 2, September 2017. Hal. 4.

memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas. Lima aspek penting dari peran, yaitu:

1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) – yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity* dan *role ambiguity*)
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Klasifikasi teori peran dalam empat golongan, yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
4. Kaitan diantara orang dan perilaku.

2.2 Teori Pembinaan

Pentingnya pembinaan melalui bina kelembagaan karena bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan akan terwujud seperti yang diharapkan manakala didukung oleh efektifitas bergaman kelembagaan yang di perlukan. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik yang menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari

pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan ke dua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu.

Pembinaan adalah suatu usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk manata ulang pola kehidupannya.²

2.2.1 Bina Manusia

Bina manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat hal ini, dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia di samping itu dalam ilmu manajemen, manusia menempati yang paling unik. Sebab, selain sebagai salah satu sumberdaya juga sekaligus sebagai pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri, termasuk dalam upaya bina manusia, adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan/pengembangan kapasitas.³

2.2.2 Bina Usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab, bina manusia yang tanpa memerikan dampak atau manfaat bagi perbaikan

² Miftah Thoha. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta. Raja Grafindo. 2002. Hal. 7.

³ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. ALFABETA. Bandung. 2017. Hal. 114.

kesejahteraan (ekonomi dan atau ekonomi) tidak akan laku, dan bahkan menambah kekecewaan. Sebaliknya, hanya bina manusia yang mampu (dalam waktu dekat/cepat) memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi dan atau ekonomi) yang akan laku atau memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

2.2.3 Bina Lingkungan

Sejak dikembangkan mazhab pembangunan berkelanjutan isu lingkungan menjadi sangat penting. Hal ini terlihat pada kewajiban dilakukannya AMDAL (Analisis Manfaat dan Dampak Lingkungan) dalam setiap kegiatan investasi, ISO 1400 tentang keamanan lingkungan, sertifikat ekolebel. Hal ini dinilai penting, karena pelestarian lingkungan (fisik) akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi (utamanya yang terkait dengan tersedianya bahan baku).

Termasuk dalam tanggung jawab sosial segala kewajiban yang harus dilakukan yang terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar kawasan (areal kerja) maupun yang mengalami dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh penanaman modal/perseroan. Sedang yang termasuk tanggungjawab lingkungan, adalah kewajiban yang dipenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/ reklamasi) sumberdaya alam dan lingkungan hidup.⁴

⁴ *Ibid.*, Hal. 116.

2.2.4 Bina Kelembagaan

Pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan mensyaratkan tersedianya kelembagaan yang berfungsi dengan efektif. Artinya bina kelembagaan tidak cukup dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan tetapi jauh lebih penting dari pembentukannya, adalah seberapa jauh kelembagaan yang telah dibentuk itu telah berfungsi secara efektif.⁵

Bina Kelembagaan merupakan kelembagaan sosial atau organisasi sosial yang tersedia dan dapat berjalan efektif sehingga dapat mendukung terselenggaranya bina manusia, usaha dan lingkungan. Sebagai suatu hal yang disetujui dan memiliki sanksi, dapat disebutkan sebuah kelembagaan apabila memenuhi 4 komponen seperti:⁶

- 1) Komponen person
- 2) Komponen kepentingan
- 3) komponen aturan, dan
- 4) Komponen Struktur

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama dari pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain

⁵ *Ibid.*, Hal. 226.

⁶ <https://repository.unair.ac.id/68423/3/Fis.IIP.101.17%20.%20Asy.p%20-%20JURNAL.pdf>
diakses pada september2021

melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.⁷

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit melainkan kekuasaan atau penguasaan. Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keperdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersikap fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.⁸

2.3.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan diartikan sebagai proses melepaskan situasi atau keadaan tertekanan, ketidak mampuan, ketidak berdayaan, kehilangan atau

⁷ Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, 2017, Bandung, Hlm. 57-58.

⁸ *Ibid.*, Hlm. 59.

ketiadaan otoritas, keterpinggiran, ketersisihan, kebangkitan dari kekalahan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan/powerless. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses perbaikan yang ditujukan untuk memberikan kemampuan kepada siapapun untuk mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat. Salah satu upaya untuk mempercepat proses perbaikan dalam pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan. Pendampingan sebagai suatu konsep berkembang dengan adanya kesadaran baru bahwa masyarakat bukanlah pihak yang tidak tahu dan tidak mau maju sebaliknya saat ini mulai dikenali bahwa masyarakat adalah pihak yang mau, memiliki pengetahuan lokal, mempunyai potensi besar serta kearifan tradisional.⁹

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidak berdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek: pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidak berdayaan, dan kemiskinan. Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan sering kali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi,

⁹ *Op. Cit.* Totok Mardikanto. Hal. 32.

atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya.¹⁰

Pemberdayaan Masyarakat diharapkan dapat memberikan energi dan kekuatan baru untuk dapat mereposisi status yang lemah menjadi setara dan sejajar dengan status yang diharapkan. Ndraha dalam Sosiologi Pendidikan menegaskan bahwa tujuan mutlak setiap program pemberdayaan adalah peningkatan *bargaining position* dan *bargaining power* suatu pihak agar mampu berhadapan secara relatif sejajar dengan pihak lain dalam rangka menciptakan rasa keadilan bersama melalui solusi (kesepakatan) yang saling menguntungkan. Inti pemberdayaan dapatlah dimulai dari konsep 7-S yaitu *system, strategy, staff, skill, leadership, style, and share value*. Pemberdayaan yang dilakukan kepada ketiga S pertama sering disebut sebagai pemberdayaan radikal (*radical empowerment*) dan pemberdayaan yang menyentuh empat unsur S terakhir dikenal sebagai pemberdayaan bertahap (*incremental empowerment*).¹¹

2.3.2 Masalah Pemberdayaan

Masalah pertama yang berkaitan dengan pemberdayaan adalah sistem atau struktur politik satu negara, yaitu kompatibilitas antara struktur infra dengan struktur supra, antara yang mewakili dan yang diwakili, antara pusat dan daerah. Untuk itu, perlu ada keseimbangan peran fungsi antar pihak, yang dalam perspektif kybernologi perlu ada keseimbangan antar subkultur yakni sub kultur ekonomi (SKE) yang mewakili pihak swasta, sub kultur kekuasaan (SKK) yang

¹⁰ Oos M. Anwas. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Alfabeta. 2014. Bandung. Hal. 48-49.

¹¹ I Nyoman Sumaryadi. *Sosiologi Pemerintahan*, Ghalia Indonesia, 2013. Bogor, Hlm. 57-58.

mewakili pemerintah dan subkultur sosial (SKS) yang mewakili masyarakat. Masalah kedua dan ketiga adalah mengidentifikasi kondisi *incapacity* atau *powerless*. Artinya, kekuatan ekonomi cenderung menuju pada kekuasaan. Itu berarti, kekuatan ekonomi selalu berorientasi pada kekuasaan.

Masyarakat menjadi lemah (*powerless*) untuk melancarkan *Social and Political Pressure*. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan bagi masyarakat agar dapat terwujud *bergaining power* SKS terhadap SKK dan SKE.¹²

2.3.3 Sumber Inspirasi Pemberdayaan

Sumber inspirasi pemberdayaan yang menyebabkan suatu organisasi merasa perlu mengadopsi konsep pemberdayaan. Pertama, adalah *philosophical source*. sumber filosofis didasarkan pada keyakinan dasar bahwa organisasi mempunyai tugas/kewajiban untuk menumbuhkan dan mengembangkan masyarakat dan dengan demikian ia akan bertumbuh dan makmur. Kedua, adalah *economic source*. Sumber ekonomis beranggapan bahwa keberhasilan ekonomi organisasi bergantung pada pemanfaatan seluruh kemampuan dan keterampilan karyawan. Sumber inspirasi pemberdayaan ketiga adalah *power and authority Dispersion*. Inspirasi pemberdayaan ini didasarkan pada asumsi bahwa pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan tradisional serta kontrol organisasi sudah tidak tepat untuk menjalankan roda organisasi. Para manajer harus melepaskan kekuasaan, kewenangan dan pengambilan keputusan kepada karyawan guna memiliki suatu organisasi yang responsif, fleksibel, dan keberhasilan. Keempat adalah *Role*

¹² *Ibid.*, Hlm. 58-59.

Focused Inspiration. Sumber inspirasi yang terfokus pada peran didasarkan pada pemikiran bahwa peran-peran masyarakat terlalu sempit dan terbatas. Peran masyarakat harus diperluas/diperbesar yang memungkinkan mereka menggunakan semua kemampuan mereka.¹³

2.3.4 Program Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus komprehensif, dan simultan, sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan yang diperintah. Adapun beberapa alasan yang melatar belakangi diperlukannya perencanaan program dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁴

1. Memberikan acuan dalam mempertimbangkan secara seksama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya di dalam kenyataan, terdapat banyak alternatif mengenai apa yang dapat dilakukan dan bagai mana cara melaksanakannya. Oleh sebab itu, dengan adanya acuan yang sudah terpilih akan memudahkan semua pihak untuk mengambil keputusan yang sebaik-baiknya.
2. Tersedinya acuan tertulis yang dapat digunakan oleh masyarakat (umum). Dengan adanya acuan tertulis, diharapkan dapat mencegah terjadinya salah pengertian (dibanding dengan pernyataan tertulis) dan dapat dikaji ulang (dievaluasi) setiap saat, sejak sebelum, selama, dan sesudah program tersebut dilaksanakan.

¹³ *Ibid*, Hlm. 59-60.

¹⁴ *Op. Cit.* Totok Mardikanto. 238-239.

3. sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap adanya usul/saran penyempurnaan yang baru. Sepanjang perjalanan pelaksanaan program, seringkali muncul sesuatu yang mendorong perlunya revisi penyempurnaan perencanaan program, oleh karena itu, dengan adanya pernyataan tertulis, dapat dikaji seberapa jauh usulan revisi tersebut dapat diterima atau ditolak agar tujuan yang diinginkan tetap dapat tercapai, baik dalam arti: jumlah, mutu, dan waktu yang telah ditetapkan.
4. Memantapkan tujuan-tujuan yang ingin dan harus dicapai, yang perkembangannya dapat diukur dan evaluasi. Untuk mengetahui seberapa jauh tujuan telah dapat dicapai, diperlukan pedoman yang jelas yang dapat diukur dan evaluasi setiap saat-saat, oleh siapa juga, sesuai dengan patokan yang telah ditetapkan.
5. Memberikan pengertian yang jelas terhadap pemilihan tentang:
 - a. Kepentingannya dari masalah-masalah insidental (yang dinilai akan menuntut perlunya revisi program).
 - b. Pemantapan dari perubahan-perubahan sementara (jika memang diperlukan revisi terhadap program).
6. Mencegah kesalah artian tentang tujuan akhir, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan maupun yang tidak dirasakan.
7. Memberikan kelangsungan dalam diri personil, selama proses berlangsung, artinya, setiap personil yang terlibat dalam pelaksanaan dan evaluasi program selalu merasakan perlunya kontinuitas program sampai tercapainya tujuan yang diharapkan.

8. Membantu pengembangan kepemimpinan, yaitu dalam mengerakkan semua pihak yang terlibat dan menggunakan sumberdaya yang tersedia dan dapat digunakan untuk tercapainya tujuan yang dikehendaki.
9. Menghindarkan pemborosan sumberdaya (tenaga, biaya, dan waktu) dan merangsang efisiensi pada umumnya.
10. Menjamin kelayakan kegiatan yang dilakukan di dalam masyarakat dan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat.

2.3.5 Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*people centered developmen*). Terkait dengan hal ini, pembangunan, apapun pengertian yang diberikan terhadapnya, selalu merujuk pada upaya perbaikan, terutama perbaikan pada mutu-hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budayanya.¹⁵

2.3.6 Strategi Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 109.

yang dikehendaki, oleh karena itu, pengertian strategi sering rancu dengan: metoda, teknik, atau taktik. Strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu:¹⁶

Pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat.

Kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat.

Ketiga, moderenisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:¹⁷

1. Menyusun instrumen pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, dari hasil temuan dari pengamatan lapangan.
2. Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat.
3. Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.

Ismawan dalam buku pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik, menetapkan adanya 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari:¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, Hal. 167-168.

¹⁷ *Ibid.*, Hal. 169.

¹⁸ *Ibid.*, Hal. 170.

1. Pengembangan sumberdaya manusia
2. Pengembangan kelembagaan kelompok
3. Pemupukan modal masyarakat (swasta)
4. Pengembangan usaha produktif
5. Penyediaan informasi tepat guna.

Berkaitan dengan penetapan strategi pemberdayaan masyarakat, terlihat adanya kelemahan umum dalam penetapan strategi pemberdayaan hanya memusatkan kegiatannya untuk memberdayakan pelaku utama yaitu masyarakat dan keluarganya. Keberhasilan pemberdayaan sering kali ditentukan oleh kualitas fasilitator dan persepsi pimpinan wilayah selaku penguasa tunggal dalam kedudukannya sebagai administrator pemerintahan dan administrator pembangunan. Disamping itu, keberhasilan pemberdayaan juga memerlukan dukungan dari banyak pihak yang berkaitan dengan kegiatan yang disuluhkan atau yang akan dilaksanakan (seperti: pedagang, dan lain-lain). Sehubungan dengan itu, dalam kegiatan pemberdayaan perlu juga memperhatikan pembagian peran yang diharapkan dari beragam penerima manfaat pemberdayaan.¹⁹

2.4 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah kecamatan disebut dengan nomenklatur desa. Di seluruh Indonesia nomenklatur sama, yaitu desa. Bahkan tidak hanya nomenklatur yang diseragamkan, melainkan juga struktur organisasinya dan mekanisme kerjanya. Hal ini dimaksudkan untuk

¹⁹ *Ibid.*, Hal. 176.

menciptakan pemerintah desa yang efisien sehingga dapat menerima tugas tugas pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah. status desa adalah satuan pemerintahan dibawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah di bawah camat yang tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. sedangkan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.²⁰

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.²¹

Kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala Desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud diatur dan diurus oleh desa. Pelaksanaan

²⁰ Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. ERLANGGA. Jakarta 2011. Hal. 67.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal. 18-22.

kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diurus oleh desa.

- 1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi sebagai instansi vertikal dari pemerintah pusat, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dan signifikan dalam menjalankan pemerintahan di ruang lingkup administratifnya dan juga dalam pengelolaan proses sosial serta pembinaan di masyarakat desa tersebut.²²

2.5 Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah lembaga yang dibuat oleh masyarakat yang disesuaikan dengan keperluan dan suatu mitra dari Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat. Adapun tugas dari LKD adalah sebagai berikut:²³

1. Membuat rencana pembangunan secara partisipatif.

²² Fahmi Dasrizal. *Peranan Kepala Desa dalam Pembinaan Masyarakat Desa tahun 2015 (Studi Pada Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Desa Sungai Buluh Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun)*. Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. 2016. Hal. 7.

²³ Della Puspita. *Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuantan Singingi (Studi Kasus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Tahun 2016)*. Jom Fisip Universitas Riau. Vol. 5. Edisi 2 Juli – Desember 2018. Hal. 2.

2. Sebagai pelaksanaan, pemeliharaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengembangan pembangunan secara partisipatif.
3. Sebagai penggerak dan pengembang partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.
4. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, mengembangkan kemitraan, memberdayakan masyarakat dan mengembangkan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Adapun jenis-jenis lembaga kemasyarakatan sebagai berikut:²⁴

1. Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW).
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
3. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
4. Karang Taruna.
5. Lembaga Adat., dan
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa:²⁵

²⁴ *Ibid.*, Hal. 3.

²⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Pasal 3. Ayat. 1-2.

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Berkedudukan di Desa setempat.
 - c. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa.
 - d. Memiliki kepengurusan yang tetap.
 - e. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap, dan
 - f. Tidak berafiliasi kepada partai politik.

2.6 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan dikatakan sebagai suatu “gaya” yang harus menentukan dan harus diikuti oleh semua pihak dalam sistem yang bersangkutan. Pendekatan ibarat bunyi kendang yang harus diikuti penabuh gamelan dan penarinya. Terkait dengan kegiatan pemberdayaan, Nugel mengemukakan bahwa, apapun pendekatan yang akan diterapkan, harus memperhatikan:²⁶

1. Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pemberdayaan melalui kegiatan pemberdayaan.
2. Sistem transfer teknologi yang akan dilakukan.

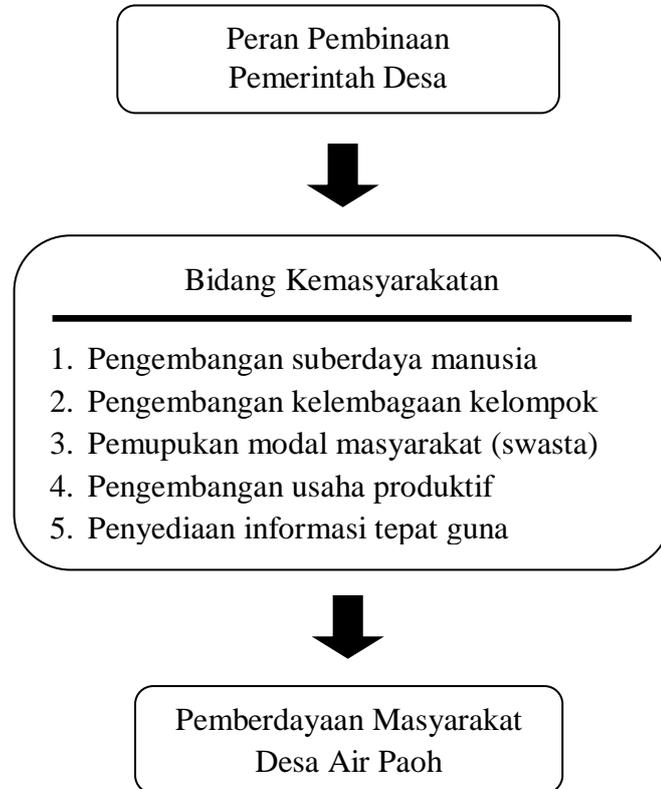
²⁶ *Op. Cit.* Totok Mardikanto. Hal. 159.

3. Pengembangan sumberdaya manusia/fasilitator yang akan melakukan pemberdayaan.
4. Alternatif organisasi pemberdayaan yang akan diterapkan, yang berhadapan dengan pilihan-pilihan antara:
 - 1) Publik ataukah swasta.
 - 2) Pemerintah ataukah non pemerintah.
 - 3) Dari atas (birokratis) ataukah dari bawah partisipatif.
 - 4) Mencari keuntungan ataukah non-profit.
 - 5) Karitatif ataukah harus mengembalikan biaya.
 - 6) Umum ataukah sektoral.
 - 7) Multi-tujuan ataukah tujuan-tunggal.
 - 8) Transfer teknologi ataukah berorientasi pada kebutuhan.

2.7 Kerangka Pikir

Fokus pada penelitian ini adalah Bagaimanakah Peran pembinaan pemerintah desa dalam bidang kemasyarakatan studi pada Pemerintah Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk mempermudah pemahaman, alur pikir penelitian dapat dilihat pada bagan 2.1 berikut ini:

Bagan 2.1
Kerangka Pikir



Sumber: Totok Mardikanto, dan Poewoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. 2012. Bandung. Hal. 170